

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 500.12.18/5152/DISKOMINFOSTANDI.IKP

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Ruang Rapat Diskominfostandi Kota Bekasi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

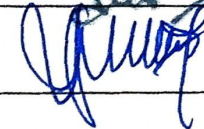
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	a. Daftar Gaji dan daftar Tunjangan Penghasilan Pegawai b. Nama Pemilik /Pemegang Kendaraan b. Data Pribadi Pihak yang dikenakan TPTGR	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, i ; - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Dapat mengundang polemik pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang tidak	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
2	Berita Acara Evaluasi Penawaran pada Pengadaan Barang dan Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 aturan tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi pihak yang terlibat	Selama Proses Pengadaan Barang dan jasa
3	MOU yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses MoU dinyatakan selesai
4	SPK yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses SPK dinyatakan selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Rincian Harga Perkiraan sendiri sebelum pengumuman pemenang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengakibatkan timbul permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Sampai Proses pengadaan selesai dan keluar pemenang
6	a. Data Pribadi Perusahaan, NPWP, Alamat Penyedia pada Faktur dan Kwitansi dalam Dokumen SPJ b. Nomor Rekening, NPWP Penyedia pada SPM, SPP dan NPD dokumen SPJ Kegiatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 aturan tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Mengakibatkan timbul permasalahan yang berumbar dari pihak-pihak yang tidak terkait. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara.	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
7	Laporan keuangan pemerintah daerah yang belum diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) RI	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara Birokrasi dan Masyarakat - Mengganggu Proses Audit	Menjaga Proses Audit berjalan dengan baik	Selama Proses Audit sampai dinyatakan selesai dan keluar LHP atas LKPD
8	Rekening Kas Umum Daerah (berupa Rekening Koran, Deposito dan Giro)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara Birokrasi dan Masyarakat	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD dan Terjaganya kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9	Data keuangan penyedia pada SP2D (Nomor Rekening, NPWP dan alamat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
10	a. Kajian Penyertaan Modal yang masih dalam Proses b. Draft PKS yang masih dalam Proses c. Lampiran PKS yang memuat formula bisnis dan strategi investasi d. Data Analisis dan Kesimpulan yang memuat analisa perhitungan dan penilaian aset	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam PKS khususnya Objek Perjanjian yang merupakan Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
11	Data pribadi pada Sertifikat Tanah, STNK, BPKB dan Berita Acara Serah Terima	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan - Berpotensi terjadinya penerbitan sertifikat tanah palsu	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset,	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
12	Dokumen Kepemilikan dan Keamanan Fisik (Denah Instalasi Vital dan Lokasi Penyimpanan Aset)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset,	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

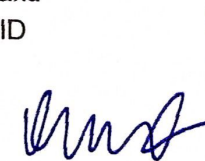
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum (Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13	Aset yang sedang dalam sengketa dan hasil audit investigasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam Dokumen Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset serta membantu kelancaran proses audit	Selama Proses Audit sampai dinyatakan selesai dan keluar LHP
14	a. Proposal Penawaran Kerjasama b. Data Analisis dan Kesimpulan yang memuat analisa perhitungan dan penilaian aset	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, i; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam PKS khususnya Objek Perjanjian yang merupakan Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi para pihak yang terlibat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik.	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
14	Data Pribadi Pengguna Aset (data penyewa atau pemakai aset)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam Dokumen Aset milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan Terjaganya kondisi keuangan dan aset serta membantu kelancaran proses audit	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan dan sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

Bahwa Pengajuan Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	JAYA EKO SETIAWAN, S.H., M.H.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
2	FITRIANTI NINGSIH, S.AB., M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
3	YULY RAHMAWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
4	SEPTIAN AGUNG, S.H	Penata Layanan Operasional	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
5	SANTI MARIA R, S.H	Penyuluh Hukum ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
6	RIA PRATIWI, S.H	Penyuluh Hukum ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
7	FIKA FATHIA RAHMA, S.E., M.Si	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8	ROBBY RAHMAT KURNIAWAN, S.Ap	Penata Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi,
selaku
PPID



Eka Chorid Ivo Vauzi, S.T., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 197712082002121001